

RENCANA STRATEGIS

FORUM INDONESIA UNTUK
TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA)
PROVINSI RIAU

TAHUN 2019-2023

**RENCANA STRATEGIS
FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA)
PROVINSI RIAU 2019-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau dibentuk sejak tahun 2004 berada dibawah lembaga Yayasan Riau Mandiri. Fitra Riau dibentuk sebagai gerakan masyarakat mengawal pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dengan mengambil peran pada isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik pada sektor anggaran dan pelayanan dasar publik yang meliputi perencanaan, pengawasan. Saat ini, dimulai sejak tahun 2011 Fitra Riau telah menjadikan lembaga yang mandiri dengan berbadan hukum Perkumpulan.

Secara kelembagaan, meskipun terjadi banyak kekurangan, berbagai kegiatan yang telah dilakukan Fitra Riau seperti, melakukan asistensi untuk mendorong perbaikan kinerja keterbukaan informasi di berbagai daerah di Riau, asistensi dan pendampingan masyarakat untuk penyadaran atas hak-hak informasi publik. Menjadikan budget resource center (BRC) dalam advokasi anggaran berupa penyiapan basis data anggaran, kajian pengelolaan anggaran, kampanye publik dan advokasi litigasi. Disektor pelayanan publik yang telah dilakukan mendorong transparansi pelayanan publik, pendampingan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik serta memastikan kebijakan anggaran yang memadai.

Melalui berbagai pendekatan dan kegiatan diatas, Fitra Riau telah berkontribusi dalam beberapa hal seperti, kebijakan penghapusan bantuan hibah dan bantuan sosial kepada lembaga-lembaga fiktif melalui APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Provinsi Riau, melalui data dan informasi anggaran meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Penyaluran DBH SDA ke level desa melalui perbaharuan kebijakan ADD berbasis SDA di Kabupaten Pelalawan.

Fitra Riau berkontribusi pada upaya untuk mendorong kebijakan yang partisipatif dalam pengawasan implementasi kebijakan pelayanan publik bersama pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, sebagai lembaga yang konsen mengawal kebijakan anggaran melalui strategi Fitra Riau berkontribusi pada peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan anggaran lingkungan hidup. Seiring perkembangan waktu dan berkembang isu, maka hingga saat ini Fitra Riau berperan diberbagai isu lainnya. Seperti mengawal dan pendampingan dalam implementasi UU Desa, pencegahan korupsi dan isu demokrasi salah satunya berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu (Pilkada, Pileg dan Pilpres).

Berdasarkan hasil refleksi, maka perlu melakukan peninjauan kembali terhadap apa yang telah dilakukan terhadap orientasi organisasi Fitra Riau kedepan. Hal ini untuk melihat dan menemukan keselarasan dengan apa yang akan dan telah dilakukan dengan orientasi kerja kelembagaan. Sehingga diharapkan dampak yang dihasilkan dari aktivitas kerja-kerja kelembagaan dateradgerasi sebagai pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Fitra Riau. Dalam kerangka inilah, Fitra Riau telah melakukan serangkaian proses penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Perkumpulan Fitra Riau untuk merumuskan rencana – rencana kerja lembaga yang terarah, terfokus pada tujuan yang hendak dicapai oleh Organisasi Lima tahun kedepan (2019-2025). Renstra inilah yang akan menjadi pijakan organisasi dalam melaksanakan kerja-kerja lembaga kedepan.

B. Mekanisme Penyusunan Renstra

Pelaksanaan penyusunan Resntra Fitra Riau dilaksanakan dengan Lokarya dan Workshop yang melibatkan Seknas Fitra, Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Dengan tahapan tahapan penyusunan Renstra Fitra Riau adalah sebagai berikut:



C. Pihak Yang Terlibat

Lokakarya dan Workshop

Penyusun Renstra Fitra Riau 2019-2023

Di Hotel Langkisau Resort & Hotel, Painan Sumatera Barat.

Peserta

No	Nama	
1	Fahry Yasin	Dewan Pengawas
2	Hadi Prayitno	Dewan Pengawas
3	Misbahul Hasan	Sekjen Seknas Fitra
4	Triono Hadi	Koordinator
5	Tarmizi	Wakil Koordinator
6	Gusmansyah	Anggota Badan Pengurus
7	Taufik	Anggota badan Pengurus
8	Khadijah	Anggota Badan pengurus
9	SUCi Lestari	Anggota Badan Pengurus
10	Farha	Anggtoa badan Pengurus
11	Aksiza Utami	Anggota Badan Pengurus

BAB II

PROFIL FITRA RIAU

A. Sejarah Singkat Fitra Riau

Perjuangan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Disadari bahwa perjuangan tersebut dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global, sementara di internal negara saja, masyarakat masih banyak yang buta anggaran akibat hegemoni dari rezim yang tertutup.

Dominasi dan penetrasi tersebut telah memposisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial, ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya rakyat. Perebutan akses sumber daya tersebut tercermin dalam politik anggaran publik di berbagai level pemerintahan. Selama ini penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Fitra Riau dibentuk sebagai gerakan masyarakat mengawal pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dengan mengambil peran pada isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik pada sektor anggaran dan pelayanan dasar publik yang meliputi perencanaan, pengawasan. Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA Riau sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak Transparansi Anggaran dan sumber – sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas Transparansi Anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

FITRA Riau memainkan peran: menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat yang berorientasi pada nilai-nilai : (1) Partisipasi masyarakat, (2) tegaknya supremasi hukum (3) transparansi, (4) kesetaraan (5) efektivitas dan efisiensi, (6) akuntabilitas, (7) adil jender, (8) keswadayaan dan (9) profesionalisme, (10) anti kekerasan

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Fitra Riau seperti, melakukan asistensi untuk mendorong perbaikan kinerja keterbukaan informasi di berbagai daerah di Riau, asistensi dan pendampingan masyarakat untuk kesadaran atas hak-hak informasi publik. Menjadikan budget resource center (BRC) dalam advokasi anggaran berupa penyiapan basis data anggaran, kajian pengelolaan

anggaran, kampanye publik dan advokasi litigasi. Disektor pelayanan publik yang telah dilakukan mendorong transparansi pelayanan publik, pendampingan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik serta memastikan kebijakan anggaran yang memadai.

Melalui berbagai pendekatan dan kegiatan diatas, Fitra Riau telah berkontribusi dalam beberapa hal seperti, kebijakan penghapusan bantuan hibah dan bantuan sosial kepada lembaga-lembaga fiktif melalui APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Provinsi Riau, melalui data dan informasi anggaran meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Penyaluran DBH SDA ke level desa melalui perbaharuan kebijakan ADD berbasis SDA di Kabupaten Pelalawan.

Fitra Riau berkontribusi pada upaya untuk mendorong kebijakan yang partisipatif dalam pengawasan implementasi kebijakan pelayanan publik bersama pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, sebagai lembaga yang konsen mengawal kebijakan anggaran melalui strategi Fitra Riau berkontribusi pada peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan anggaran lingkungan hidup. Seiring perkembangan waktu dan berkembang isu, maka hingga saat ini Fitra Riau berperan diberbagai isu lainnya. Seperti mengawal dan pendampingan dalam implementasi UU Desa, pencegahan korupsi dan isu demokrasi salah satunya berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu (Pilkada, Pileg dan Pilpres).

Pada awal berdirinya, Fitra Riau dibentuk pada tahun 2004 berada dibawah lembaga Yayasan Riau Mandiri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. Seiring perkembangan waktu perlunya memperkuat *legal standing* dan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian lembaga, pada tahun 2011 oleh Usman, Triono Hadi dan Faisal Bainil Azhar sebagai pemegang estafet kepengurusan dari para pendiri sebelumnya, memisahkan Fitra Riau dari lembaga induknya dan membentuk badan hukum dengan nama Perkumpulan Fitra Provinsi Riau. Untuk lebih memperkuat posisi kelembagaan pada tahun 2017, Fitra Riau telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-00673.AH.02.01.TAHUN 2017 tanggal:28 juli 2017.

B. Produk dan Layanan

Untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap menjaga independen Fitra Riau bekerja pada dua dimensi sekaligus. Yaitu melakukan penguatan kepada masyarakat sipil (*empowerment*) dan mendorong perubahan kebijakan kepada pemerintah (*enlightenment*). Dala hal ini masyarakat sipil membutuhkan informasi akurat dan keterampilan yang memadai untuk mengontrol serta memastikan kebijakan, program dan anggaran dari pemerintah yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Penguatan – penguatan kepada masyarakat sipil dilakukan baik secara langsung maupun dengan mengoptimalkan saluran media massa maupun media internal lembaga.

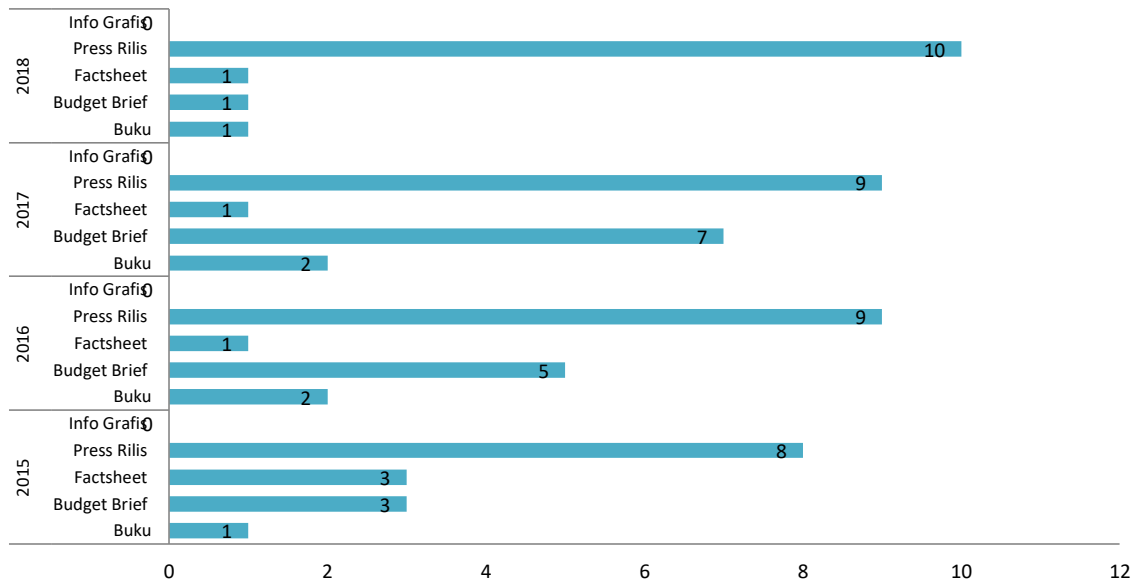
Sementara di sisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan hanya berpedoman pada hal-hal yang bersifat administratif, prosedural, birokratis dan tertutup. Sehingga kritik dan masukan mutlak dibutuhkan untuk memperkaya sudut pandang dan mencerahkan pemerintah supaya memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat dalam membahas dan menyusun kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat. Dalam kontek ini pula Fitra Riau memainkan peran melakukan pendampingan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Berikut ini adalah produk – produk yang sudah dihasilkan dan layanan yang selama ini Fitra Riau jalankan :

1. Produk

Sejauh ini Fitra Riau, telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran, serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan anggaran oleh pemerintah dan legislative. Dalam upaya untuk berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran masyarakat dan mempengaruhi kebijakan, produk-produk yang dihasilkan antara lain dalam bentuk buku/buku panduan, press rilis, budget brief, factsheet, dan info grafis.

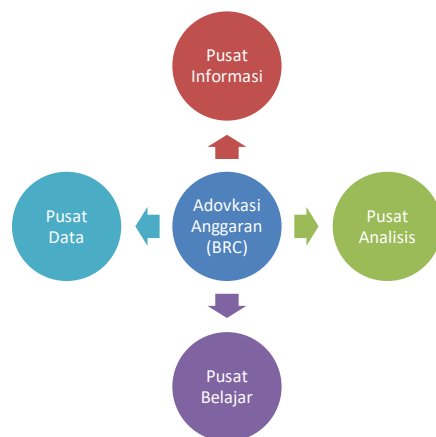
Berikut ini adalah perkembangan produk, yang telah dihasilkan oleh FITRA RIAU selama 2015-2018. Produk-produk ini seluruhnya telah terpublikasi melalui saluran media informasi lembaga Fitra Riau: www.fitrariau.org:



2. Layanan

Sebagai strategi advokasi kebijakan anggaran, Fitra Riau menjadi simpul jaringan Seknas Fitra menjalankan mandat organisasi dengan mengembangkan *Budget Resource Center (BRC)* atau pusat pengetahuan anggaran. BRC menjadi strategi dan sarana dalam melakukan kerja-kerja

rutin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil dan pengambil kebijakan ditingkat daerah. Sebagai fungsi BRC ini, Fitra Riau menjalankan empat fungsi utama sebagai upaya mendukung advokasi anggaran, yaitu menjadi Pusat Data, Pusat Informasi, Pusat Analisis/Kajian dan Pusat Belanja Anggaran.



Berikut ini adalah bentuk layanan Fitra Riau melalui BRC yang telah dilakukan :

a) Fitra Riau sebagai Pusat Data Anggaran

Fitra Riau sebagai pusat data anggaran yaitu melakukan kerja pencarian dan penghimpunan data/dokumen dan informasi anggaran dan pengolahan data sebagai bahan baku untuk dianalisis secara lebih detail. Prosesnya Fitra Riau melakukan akses informasi anggaran berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan dan anggaran seperti dokumen RPJMD, RKPD, APBD, DPA, LPJ, LHP BPK serta dokumen lainnya yang relevan dengan anggaran. Kemudian dokumen-dokumen yang berhasil di himpun dilakukan input data yang dikumpulkan

dalam satu server data, dan diolah menjadi bahan dalam melakukan analisis anggaran untuk kebutuhan advokasi yang dilakukan.

No	Data/Dokumen	Tahun
1	Serial Data APBD Provinsi Riau dan Perubahan	2010-2019
2	Serial Data APBD Kota Pekanbaru	2010 -2018
3	LHP BPK Provinsi dan Kabupaten Kota Se Riau	2012-2016
4	Serial Data APBD Beberapa Kabupaten	2010-2018
5	Data Setatistik Update BPS	
6	Dll.	

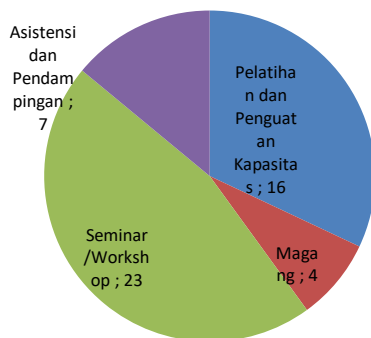
b) Fitra Riau Sebagai Pusat Analisis Anggaran

Secara terus menerus Fitra Riau telah menghasilkan kajian terkait kebijakan anggaran secara umum, isu anggaran sektoral (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup) baik sebagai mandat organisasi maupun program kerja. Hasil kajian/analisis tersebut diproduksi dalam bentuk policy brief, budget brief, position paper, press release, infografis dan factsheet, sehingga mudah dipahami masyarakat luas. Berkaitan dengan fungsi analisis, ketersediaan data menjadi penting untuk mendukung kajian/analisis, karna semua kerja-kerja penelitian harus berbasis data baik data primer maupun sekunder seperti dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian yang dilakukan Fitra Riau.

c) Fitra Riau Sebagai Pusat Informasi Anggaran

Pusat informasi dan publikasi yaitu menyajikan informasi anggaran yang mudah dipahami publik dalam bentuk pasif dan aktif. Dalam bentuk pasif yaitu publikasi hasil kajian dan analisis anggaran melalui website www.fitrariau.org yang disebarluaskan melalui facebook, twitter, instagram dengan maksud untuk memberikan pengathuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal penting dalam kebijakan anggaran. Dalam bentuk aktif yaitu mempublikasikan hasil kajian dan analisi melalui press rilis, media briefing, selain untuk mencari dukungan publik dalam advokasi anggaran juga untuk memberikan pressure terhadap pengambil kebijakan di daerah. Peran publikasi dan informasi yang dilakukan oleh Fitra Riau juga menjadi sajian meda massa cetak maupun elektronik

d) Fitra Riau sebagai Pusat Belajar Anggaran

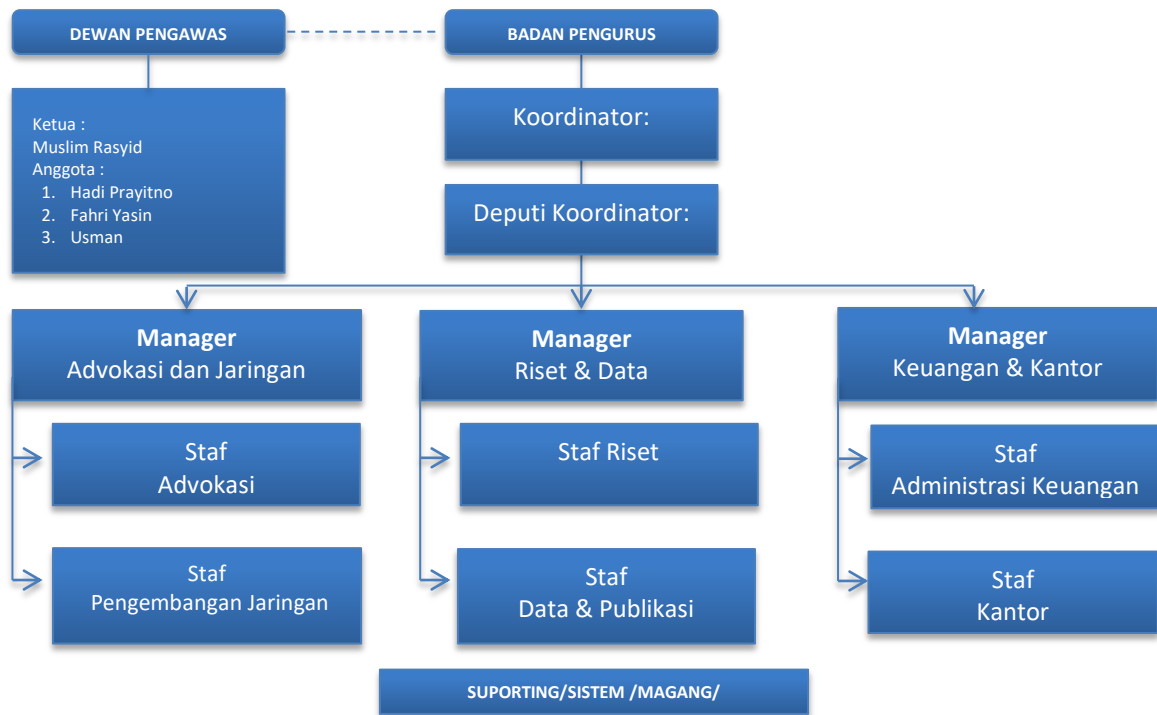


Untuk memperluas jaringan dan gerakan advokasi anggaran didaerah adalah dengan mengfungsikan FITRA RIAU sebagai pusat pengetahuan anggaran. Pusat pengetahuan anggaran yaitu memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada staff fitra Riau, masyarakat, komunitas. Pusat belajar juga dirancang untuk pemerintah daerah, Desa, DPRD, dan pihak-pihak lainnya. Selama ini sebagai wahana belajar dan advokasi yang telah dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan dan penguatan kapasitas, magang, asistensi dan pendampingan serta seminar.diskusi/workshop.

C. Struktur Organisasi Fitra Riau

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Perkumpulan sebagai pengambilan keputusan tertinggi organisasi menetapkan komponen kelembagaan Fitra Riau terdiri dari dua yaitu Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Komponen badan pengawas dipimpin oleh satu ketua dan empat anggota badan pengawas. Sedangkan badan pengurus ditetapkan satu koordinator yang bertanggungjawab pelaksanaan kepengurusan Fitra Riau yang dibantu oleh staff badan pengurus. Untuk memenuhi kebutuhan kerja lembaga Fitra Riau, maka ditetapkan struktur pengurus Organisasi Perkumpulan Fitra Riau sebagai berikut :

STURKTUR BADAN PENGURUS PERKUMPULAN FITRA RIAU



D. Profil Sumber Daya Manusia Fitra Riau

Untuk mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi maka dibutuhkan, personil yang cakap, memiliki integritas tinggi serta profesional dalam menjalankan roda kepengurusan Fitra Riau. Secara struktur badan Pengurus Fitra Riau dibawah tanggungjawab Koordinator yang dibantu oleh Deputi koordinator dan manager devisi serta staff/unit yang ada dibawahnya. Dalam pengambilan keputusan strategis Koordinator didukung oleh Deputi Koordinator, dan Tiga manager devisi serta mengkonsultasikan kepada badan pengawas.

- **Deputi koordinator** memiliki tanggungjawab terhadap terhadap kerja-kerja organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan internal kelembagaan. Dalam menjalankan fungsinya didukung oleh manager devisi yang secara teknis melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- **Manager Advokasi dan pengembangan jaringan** didukung oleh unit advokasi dan unit pengembangan jaringan yang menjalankan fungsi memperluas gerakan advokasi anggaran dan melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan.
- **Manager Riset dan Data** didukung dengan unit riset dan unit data informasi untuk melakukan pengembangan dan memperkuat *evidence base* advokasi serta melakukan inovasi dan desiminasi produk-produk layanan lembaga Fitra Riau
- **Manager Accounting** didukung oleh unit administrasi keuangan dan unit kesekretariatan untuk kualitas layanan administrasi kelembagaan dan pengelolaan kesekretariatan yang menyangkut keuangan, asset dan kantor.

Profil singkat personil Fitra Riau sebagai berikut :

 <p>Triono Hadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator • Sarjana Ilmu Komunikasi • Pengalaman 9 tahun 	 <p>Gusmansyah, SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staff Unit Riset • Sarjana Ilmu Pemerintahan (kandidat Master) • Pengalaman 3 tahun
 <p>Tarmizi, SH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deputi Koordinator • Sarjana Hukum (Kandidat Master) • Pengalaman 7 Tahun 	 <p>Suci Lestari Putri, SH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staff Data dan Informasi • Sarjana Hukum • Pengalaman 3 Tahun
 <p>Taufik, SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manager Advokasi & Pengembangan Jaringan • Sarjana Ilmu Pemerintah (Kandidat Master) • Pengalaman 3 Tahun 	 <p>Sartika Dewi, SPd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staff Pengembangan Jaringan • Sarjana Pendidikan • Pengalaman 3 Tahun
 <p>Khadijah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manager Keuangan dan Kesekretariatan • Sarjana Ilmu Komunikasi • Pengalaman 3 Tahun 	 <p>Farha, SE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staff Administrasi & Keuangan • Sarjana Ilmu Ekonomi • Pengalaman 2 Tahun
 <p>Akziza Utami, SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staff Data & Informasi • Sarjana Ilmu Pemerintahan • Pengalaman 2 Tahun 	

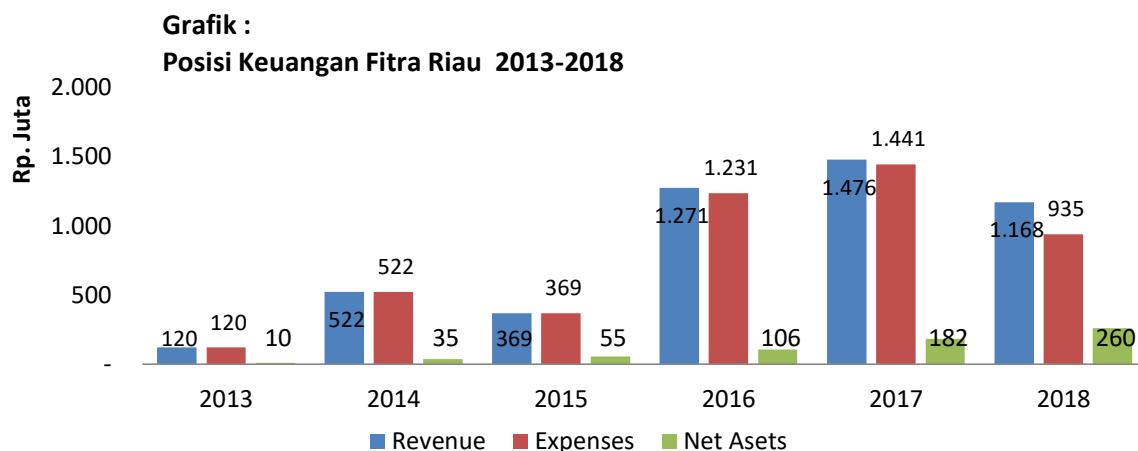
Perkembangan personil Fitra Riau menunjukkan peningkatan selama 2015-2018, bermula dari 4 personil menjadi 9 personil, yang direkrut melalui mekanisme magang yang terus dilakukan penguatan kapasitas hingga memutuskan untuk berkiprah di lembaga secara berkelanjutan. Perkembangan personil Fitra Riau dari waktu-kewaktu dapat dilihat pada table berikut ini:

Tahun	Staff Inti	Kontrak Program	Relawan	Jumlah
2010-2012	3 Orang	0 Orang	1 Orang	4 Orang
2012-2013	3 Orang	0 Orang	1 Orang	4 Orang
2013-2015	3 Orang	2 Orang	0 Orang	5 Orang
2016	3 Orang	1 Orang	5 Orang	9 Orang
2017	5 Orang	0 Orang	3 Orang	8 Orang
2018 - Sekarang	7 Orang	0 Orang	2 orang	9 Orang

E. Kondisi Keuangan Fitra Riau

Kondisi keuangan Fitra Riau menunjukkan perkembangan yang baik beberapa tahun terakhir. Selama 2013-2018 Fitra Riau membukukan keuangan dengan kondisi peningkatan yang signifikan. Tahun 2013 pendapatan yang diterima Fitra Riau berasal dari program-program sebesar Rp. 120

juta, meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1,4 Milyar. Kondisi mengalami penurunan menjadi pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,1 milyar.



Kenaikan pendapatan tersebut mengakibatkan kenaikan aset bersih (pendapatan dikurangi beban). Seiring dengan peningkatan pendapatan dalam kurun waktu tersebut, posisi keuangan FITRA Riau juga mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Jika total aset pada tahun 20013 sebesar Rp 10 juta,- maka pada tahun 2018, mencapai Rp. 260 juta. Hal-hal tersebut tentu saja diakibatkan oleh semakin meningkatnya kepercayaan para donor akan eksistensi dan kredibilitas FITRA Riau sebagai organisasi masyarakat sipil yang cukup berperan dalam mempromosikan transparansi anggaran yang pro rakyat.

Perkembangan Keuangan FITRA RIAU 2013-2018

Tahun	Kas Internal Awal Tahun	Pendapatan Program	Pengeluaran Program & Non Program	Sisa Dana Program	Kas Internal Akhir Tahun
2013	-	120.000.000	120.000.000	-	10.000.000
2014	10.000.000	522.000.000	522.000.000	-	35.000.000
2015	35.000.000	369.000.000	369.000.000	-	55.200.000
2016	55.200.000	1.270.900.000	1.230.697.428	36.256.010	105.760.000
2017	105.760.000	1.475.558.990	1.440.953.090	34.605.900	182.054.256
2018	182.054.256	1.167.651.840	935.132.390	232.519.450	259.789.761

F. Sarana Penunjang

Fitra Riau dalam menjalankan kerja-kerja kelembagaan dilengkapi dengan sarana pendukung. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai sarana pendukung yang dikelola oleh Fitra Riau baik digunakan atau dikuasi oleh peronil lembaga maupun sarana pendukung untuk kerja umum.

1. Kantor

Kantor Fitra Riau berada di jalan Kartama Gg, Bambu Nomor 5 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kantor yang digunakan masih berstatus kontrak tahunan. Dilengkapi dengan 3 ruang kerja, 1 ruang meeting, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur dan 2 toilet.

2. Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kerja, yang dimiliki Fitra Riau adalah sebagai berikut:

No	Nama Aset/Barang	Penguasaan Aset	Tahun Pembelian	Nilai Aset (Rp) (saat pembelian)	Sumber Dana	Kondisi saat ini
1	Kipas Angin (Miyako)	kantor	2012	250.000	Internal	Rusak
2	Meja kayu Persegi Panjang	Kantor	2012	700.000	Internal	Baik
3	Meja Kantor Fujinika 2 buah	Kantor	2012	800.000	Internal	Baik
4	Kursi Plastik Napolly 101 3 buah	Kantor	2012	135.000	Internal	Baik
5	Lemari kayu Rak Buku (3 buah)	Kantor	2014	1.250.000	PWYP	Rusak Ringan
6	Magicom Miyako	Kantor	2014	260.000	Internal	Baik
7	Printer Canon Pixma Ip2770	Kantor	2014	550.000	PWYP/ Ford	Rusak
8	Rak Piring susun 3 Plastik	Kantor	2014	245.000	Internal	Baik
9	Dispenser Miyako (Hot & Cool)	Kantor	2014	298.000	Internal	Rusak Ringan
10	Alat Tulis kotak plastik laci 4-layer	Kantor	2014	88.000	Internal	Baik
11	Meja makan lipat plastic Napolly	Kantor	2014	345.000	Internal	Baik
12	Meja Kayu Panjang Belah 2	Kantor	2014	1.200.000	Internal	Baik
13	Kursi Nampolly R Merah 6 buah	Kantor	2015	390.000	Internal	Baik
14	Handycam Sony dan tripod	Kantor	2015	2.500.000	PWYP	Baik
15	Kursi Napolly Petak warna Merah 10 buah	Kantor	2015	550.000	Internal	Baik
16	Infokus Panasonic	Kantor	2015	5.200.000	PWYP	Rusak
17	Layar Proyektor tripod kaki	Kantor	2015	550.000	Internal	Baik
18	Meja Komputer	Kantor	2016	900.000	TAF/STAPAK	Baik
19	Hardisk Eksternal	Kantor	2016	955.000	TAF/STAPAK	Rusak
20	Meja Kantor 15 MM 2 buah	Kantor	2016	985.000	TAF/STAPAK	Baik
21	Kursi Kerja Donati warna hijau (2 buah)	Kantor	2016	525.000	TAF/STAPAK	Baik
22	Kursi Kerja Chairman MC Warna Hitam (2 buah)	Kantor	2016	600.000	TAF/STAPAK	Baik
23	Mouse Bluetooth	Kantor	2016	265.000	TAF/STAPAK	Baik
24	Kompas Gas	Kantor	2016	259.000	Internal	Baik
25	Tabung Gas	Kantor	2016	135.000	Internal	Baik
26	Perlengkapan Dapur Piring, gelas dll.	Kantor	2016	350.000	Internal	Baik
27	Kipas Angin Plastik Miyako	Kantor	2016	330.000	TAF/STAPAK	Rusak
28	Meja Kantor ½ Biro	Kantor	2016	350.000	TAF/STAPAK	Baik
29	Laptop Acer 11" black	Kantor	2016	3.500.000	TAF/STAPAK	Rusak
30	1 Set Komputer	Kantor	2016	4.500.000	Seknas Fitra	Baik
31	Printer brother (DCP –J100)	Kantor	2016	1.300.000	TAF/STAPAK	Rusak
32	Kipas Angin Miyako Besi	Kantor	2016	750.000	TAF/STAPAK	Baik
33	Lemari Besi	Kantor	2016	1.500.000	TAF/STAPAK	Baik
34	Printer Canon 287 Infus	Kantor	2016	1.100.000	TAF/STAPAK	Rusak
35	Brangkas	Kantor	2016	1.450.000	TAF/STAPAK	Baik
36	Laptop Asus	Khadijah	2016	3.099.000	TAF/STAPAK	Baik
37	Hardisk Eksternal	Tarmizi	2017	965.000	TAF/STAPAK	Rusak
38	Laptop Asus Texture White	Sartika	2017	2.999.000	TAF/STAPAK	Baik
39	Meja Pimpong 1 Set	Kantor	2017	3.300.000	Internal	Baik

40	Mouse Biru dan hitam	Khadijah	2017	515.000	Internal	Rusak
41	Printer EPSON L365	Kantor	2017	3.135.000	TAF/STAPAK	Baik
42	Meja Kayu Print	Kantor	2017	200.000	Internal	Baik
43	Lemari Rak Buku	Kantor	2017	3.950.000	TAF/STAPAK	Baik
44	Printer Epson L360	Kantor	2017	3.085.000	TAF/STAPAK	Baik
45	Laptop Lenovo 14" Silver CoreI3	Tarmizi	2018	5.500.000	TAF/STAPAK	Baik
46	Meja Kantor 2 Buah	Kantoe	2018	700.000	TAF/STAPAK	Baik
47	Laptop Lenovo (Silver) 11 inc, seleron.	Taufik	2018	3.500.000	Kas Internal	Baik
48	Kipas Angin Besi Gantung Miyako	Kantor	2018	400.000	Internal	Baik
49	Rak Piring	Kantor	2018	1.300.000	TAF/STAPAK	Baik
50	Hardisk Ekternal	Usman	2018	850.000	TAF/STAPAK	Baik
51	Tripod Hanphone	Suci	2018	100.000	Internal	Baik
52	Kipas Angin Miyako Plastik	Kantor	2018	285.000	Internal	Baik
53	Laptop Lenovo 14" Blue Core I5	Suci Lestari	2018	7.120.000	ICCTF-YMI	Baik
54	Mouse Laptop 2 buah	Suci	2018	205.000	GIZ	Baik
55	Laptop Hp Ryzen 14" Silver Core I3	Triono Hadi	2018	6.100.000	GIZ	Baik
56	Infocus Epson	Kantor	2018	5.600.000		
JUMLAH NILAI ASET				<u>87.973.000</u>		

BAB III ORIENTASI STRATEGIS FITRA RIAU 2019-2023

Perlunya reformulasi orientasi organisasi kedalam rencana strategis Fitra Riau kedepan berlandaskan atas beberapa hal: (1) Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa pentingnya orientasi dan arah organisasi sebagai acuan dalam mengukur pencapaian kinerja organisasi; (2) Tinggi ekspektasi stakeholder agar Fitra Riau menjadi lembaga masyarakat pengawas kebijakan anggaran di daerah yang kredibel dan berkualitas; (3) Masih terbatasnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu anggaran serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan anggaran di Provinsi Riau.

Disini lain, isu kebijakan anggaran yang menjadi core isu organisasi Fitra Riau dihadapkan pada persoalan sebagai berikut; (1) Masih rendahnya kesadaran pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam seluruh tahapan penganggaran (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban); (2) Proses perencanaan anggaran yang masih menempatkan posisi masyarakat dalam posisi yang tidak kuat; (3) masih tingginya kasus – kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara serta rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (4) kebijakan anggaran yang belum dilaksanakan secara proporsional, berpihak terhadap masyarakat miskin, marjinal serta merespon terhadap isu – isu sektoral yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal-hal tersebut menjadi dasar kuat bagi organisasi Fitra Riau untuk melakukan pembenahan secara komprehensif terkait pengembangan kapasitas kelembagaan dan perencanaan, pelaksanaan agenda riset advokasi kebijakan.

A. Mandat

Sebagai acuan dasar organisasi, melalui Rapat Anggota Perkumpulan (Rapel) sebagai pengambilan keputusan tertinggi telah menetapkan STATUTA sebagai dasar berpijak organisasi FITRA Riau. Untuk itu Rencana Strategis yang disusun menyesuaikan dengan mandat, tujuan, visi, misi, nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam STATUTA.

Secara filosofis Fitra Riau merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom, non profit (nirlaba). Organisasi Fitra Riau didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis guna terwujudnya kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai upaya untuk kesejahteraan kehidupan rakyat dan hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam mencapai hal tersebut Fitra Riau bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan rakyat untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas anggaran. Sehingga tercipta anggaran yang berpihak terhadap rakyat serta dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan gerakannya Fitra Riau diupayakan dengan didasarkan atas nilai-nilai fundamental yaitu; (1) **Independen**, merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun pinjaman luar negeri; (2) **Integritas**, adalah pengejawantahan dari spirit organisasi untuk menjaga keutuhan antara apa dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota organisasi yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Sementara nilai-nilai yang mendasari dalam setiap tindakan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** (internal) Manajemen organisasi dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh staf dan komponen Fitra Riau. (eksternal) FITRA Riau sebagai badan publik, dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya selalu menyediakan informasi yang cukup dan membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai dengan 13tatur FITRA dan ketentuan perundangan
- b. **Partisipatif:** Terbuka untuk keterlibatan berbagai komponen internal organisasi dan kelompok lain dalam pengambilan keputusan-keputusan penting.
- c. **Kemandirian:** Merdeka dalam bertindak dan pengambilan keputusan organisasi;
- d. **Kesetaraan:** Perlakuan setara kepada setiap orang;
- e. **Akuntabilitas:** Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi input, output, dan outcome kepada internalmanagement, dewan nasional, anggota FITRA, lembaga donor, dan publik secara luas berdasarkan rencana strategis, SOP, peraturan perundangan yang berlaku dan moral. Dan tidak ada kompromi bagi staf dan anggota FITRA yang terbukti melakukan korupsi;
- f. **Anti Kekerasan:** Tidak mempraktekkan/menggunakan dan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis;
- g. **Profesionalisme:** Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, cakap dalam bidangnya dan dapat dipercaya
- h. **Efektivitas dan Efisien:** Hemat dalam pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan output yang maksimal. Menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk hasil yang tepat sasaran dan memiliki manfaat yang maksimal bagi organisasi dan hajat hidup orang banyak;
- i. **Kesukarelawan:** Ikhlas berbuat lebih dari tuntutan tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama

B. VISI & MISI

1. Visi

Visi Perkumpulan Fitra Riau adalah:

Menjadi Lembaga kajian dan advokasi yang terpercaya untuk terciptanya tata kelola kebijakan anggaran berpihak kepada rakyat”

Mengacu pada rumusan visi Fitra Riau yang telah ditetapkan tersebut, maka terdapat dua target yang akan dicapai oleh Lembaga FITRA RIAU adalah sebagai berikut :

- **Lembaga Kajian dan Advokasi Terpercaya:**
Yaitu lembaga yang menghasilkan dan memberikan layanan kajian, riset sebagai basis bukti (*vidence based*) dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran yang mandiri, berkualitas serta dapat diterima oleh berbagai pihak.
- **Kebijakan Anggaran Berpihak Kepada Rakyat:**
Adalah suatu keadaan dimana kebijakan anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efisien, proporsional dan pro terhadap masyarakat miskin sehingga tercipta anggaran Negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat ditingkat Desa, Daerah dan Nasional.

2. Misi :

Untuk mencapai visi tersebut, maka Fitra Riau mengemban misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kebijakan anggaran negara yang berbasis pada kebutuhan rakyat dan terbebas dari korupsi;
- b. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan kebijakan anggaran;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, perempuan, anak, kelompok marginal dan lingkungan hidup;
- d. Menjadikan FITRA Riau sebagai acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran dari tingkat desa, daerah dan nasional

C. Peta Situasi Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil refleksi internal dan evaluasi kinerja oleh seluruh komponen organisasi Fitra Riau, diperoleh gambaran peta situasi internal dan eksternal Organisasi Fitra Riau dalam bentuk Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara kelembagaan telah memiliki eksistensi dalam 5 tahun terakhir 2. Sudah menjadi rujukan gerakan advokasi anggaran di Riau 3. Memiliki kapasitas khusus dalam melakukan analisis anggaran daerah 4. Memiliki data anggaran daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayah Riau dalam 5 tahun terakhir 5. Menjadi satu-satunya lembaga advokasi anggaran daerah di Riau. 6. Lembaga sudah mempunyai SOP 7. Menjadi pusat studi anggaran di Provinsi Riau 8. Hubungan/relasi dengan Pemda terutama Provinsi Riau cukup baik 9. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Fitra Riau dalam advokasi anggaran. 10. Usulan kebijakan yang diakomodir pengambil keputusan/pemerintah 11. Telah menghasilkan produk buku, policy brief, factshet dan rilis 12. Telah melakukan layanan advokasi dan peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki agenda advokasi yang terarah dan konsisten & peta jalan gerakan advokasi anggaran daerah yang jelas 2. Belum mempunyai standarisasi hasil analisis dan penjamin mutu kualitas produk. 3. Belum mempunyai standarisasi kapasitas sumberdaya manusia/sumberdaya ahli yang dibutuhkan organisasi 4. Logistik organisasi untuk melakukan gerakan sangat terbatas dan masih tergantung kepada lembaga donor. 5. Kapasitas staff belum merata dalam melakukan analisis dan advokasi anggaran 6. Sistem pengorganisasian masyarakat masih lemah. 7. Belum memiliki kurikulum melek anggaran yang mudah dipahami masyarakat dan belum memiliki sistem kaderisasi yang regular 8. Konsistensi gerakan masih fluktuatif 9. Staff belum memiliki kemampuan untuk menangkap isu 10. Masih kurangnya komunikasi intern organisasi. 11. Belum semua daerah di Riau tersentuh dalam advokasi anggaran. 12. Belum adanya SOP dalam analisis dan kajian anggaran. 13. Belum terbangunnya komunikasi dengan pemda di 7 daerah Kab/Kota dalam advokasi anggaran. 14. Belum berjalan secara maksimal BRC Fitra.
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan media lokal dan media alternatif sebagai jaringan/mitra gerakan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat masih sebatas proses perencanaan dan belum optimal pada sisi penganggaran

<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembaga non-struktural berpotensi sebagai bagian dari sumberdaya gerakan; KPK, KIP, Ombudsman, BPK, dan PPATK 3. Banyak regulasi yang bisa dijadikan kekuatan atau pendukung gerakan. 4. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat atas hak yang harus diperjuangkan 5. Semakin terlihatnya keinginan politik elit untuk melakukan perubahan, meskipun champion demokrasi masih sedikit jumlahnya 6. Implementasi UU Desa yang sudah berjalan 4 tahun. 7. Adanya kemauan mahasiswa yang mau terlibat dalam gerakan advokasi anggaran. 8. Penguatan kerjasama dengan pemerintahan desa, supaya tata kelola anggaran tepat sasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Gerakan advokasi anggaran belum menjadi gerakan social karena isu yang diperjuangkan belum menjadi isu kolektif 3. Kebijakan anggaran masih belum tepat sasaran 4. Kemampuan DPRD belum mampu mengimbangi Pemda dalam kebijakan anggaran 5. Masih maraknya praktek mafia anggaran; salah satu temuannya adalah sector swasta berkontribusi besar terhadap persoalan anggaran 6. Masih terjadi oligarkhi; kooptasi ruang politik/pengambilan kebijakan di daerah 7. Penguasaan terhadap aplikasi anggaran berbasis elektronik 8. Pemerintahan daerah masih tertutup dengan CSO/NGO 9. Komunikasi dengan pemda prov/kab/kota belum terbangun dengan baik 10. Ego sektoral OPD sangat kuat, menjadi kendala dalam advokasi
--	--

D. Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta orientasi organisasi lima tahun kedepan, maka menghasilkan peta isu strategis dalam dua dimensi internal dan dimensi eksternal sebagai berikut:

1. Isu Strategis Internal

isu strategis internal kapasitas kelembagaan yang masih lemah meliputi kompetensi sumberdaya manusia, penataan dan pengelolaan untuk menjadi aktual dan validitas data, penetaan struktural, mekanisme jaminan dan kualitas produk analisi dan kajian, perluasan jaringan dan kader advokasi anggaran, perencanaan dan pengelolaan program, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan serta keberlanjutan pendanaan.

2. Isu Strategis Eksternal

Isu strategis eksternal yang perlu direspon dan diperhatikan oleh Fitra Riau kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Masih terjadi oligarkhi; kooptasi ruang politik/pengambilan kebijakan di daerah
- b) Masih maraknya praktek mafia anggaran; salah satu temuannya adalah sektor swasta berkontribusi besar terhadap persoalan anggaran dan praktek korupsi dalam sistem prosedur mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
- c) Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang belum responsif dan efektif terhadap isu pelayanan sosial dasar, kemiskinan, marjinal, gender dan isu lingkungan hidup.
- d) Budaya Penyelenggara Negara dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terbuka dan resitensi terhadap input dan inisiatif dari pihak luar.
- e) Belum optimalnya implementasi UU Desa

- f) Legitimasi peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik meliputi pengawasan perencanaan legislasi, pengawasan anggaran, pengawasan pengelolaan asset dan pengawasan pelayanan publik.

E. Tujuan dan Sasaran

Bertolak dari isu strategis yang telah teridentifikasi, tujuan dan sarana terhadap misi Fitra Riau adalah sebagai berikut :

1. Fitra Riau Mendorong peningkatan kualitas kebijakan anggaran negara yang berbasis pada kebutuhan rakyat dan terbebas dari korupsi; dengan sasaran utama adalah :
 - a) **Meningkatnya advokasi berbasis riset** yang di fokuskan dalam upaya untuk mendorong kualitas transparansi dan peningkatan akuntabilitas dalam prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam rangka menurunkan praktek korupsi
 - b) **Meningkatnya intensitas advokasi** dalam upaya mendorong ruang partisipasi dalam proses perencanaan regulasi, kebijakan publik dan anggaran bagi masyarakat yang berkualitas.
2. Fitra Riau mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan kebijakan anggaran; dengan sarana utama adalah :
 - a) **Meningkatnya produk-produk pengetahuan yang terpublikasi** untuk digunakan masyarakat terkait prosedur dan mekanisme perencanaan kebijakan publik dan penganggaran di tingkat Desa dan Daerah.
 - b) **Meningkatnya jumlah kader dan partisipan** yang diciptakan melalui belajar analisis anggaran (BeLA-Anggaran).
 - c) **Meningkatnya gerakan komunitas dan masyarakat** yang berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik dan anggaran.
3. Fitra Riau mendorong peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, perempuan, anak, kelompok marjinal dan lingkungan hidup;
 - a) **Meningkatnya intensitas riset dan advokasi** berbasis riset yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa yang didokuskan dalam upaya mendorong kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan dan anak, kelompok marjinal dan lingkungan hidup secara memadai, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas anggaran pelayanan sosial dasar.
 - b) **Meningkatnya kuantitas kerjasama terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa** yang difokuskan dalam peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan anggaran.
4. Fitra Riau mendorong Peningkatan kualitas kelembagaan organisasi sebagai acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran dari tingkat desa, daerah dan nasional. Dengan sarana utama adalah:
 - a) **Terwujudnya Pusat Pengetahuan Anggaran / Budget Resource Center (BRC)** Fitra Provinsi Riau.
 - b) **Meningkatnya kualitas kompetensi kelembagaan** yang difokuskan pada peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, profesionalitas dan efektifitas kelembagaan.
 - c) **Terselenggaranya penataan** dan penyediaan data dan informasi
 - d) **Meningkatnya jumlah dan kualitas produk kajian/riset**, pengetahuan dan terpublikasi secara luas dan massif.

- e) **Terbangunya kerjasama jaringan secara kuat dan luas** difokuskan pada kerjasama kampus, lembaga Negara eksekutif, legislative dan lembaga Negara lainnya, CSO lokal nasional, dan community center ditingkat basis.
- f) **Terciptanya keberlanjutan pendanaan kelembagaan** yang difokuskan untuk penyiapan kewirausahaan sosial, perluasan jaringan donor.

F. Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka strategi yang ditempuh adalah dengan mengkolaborasikan strategi agenda transformasi kelembagaan dan strategi integrasi agenda riset advokasi.

1. **Strategi transformasi kelembagaan** diperlukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang mampu dan dipercaya sebagai agen kontrol sosial untuk mewujudkan kebijakan pelayanan publik dan penganggaran yang berpihak terhadap kesejahteraan rakyat melalui agenda riset dan advokasi. Untuk mencapai hal itu maka yang perlu dilakukan adalah:
 - Mengembangkan Pusat Pengetahuan Anggaran/ Budget Resource Center (BRC) sebagai ruh gerakan advokasi anggaran yang dilengkapi dengan kapasitas personel dan sarana prasana pendukung dan penyediaan instrumen pendukung kelembagaan.
 - Mengkombinasikan antara gerakan advokasi konfrontative dengan gerakan advokasi kooperatif dalam mempengaruhi kebijakan.
 - Mengembangkan alternative pendanaan untuk menjamin keberlanjutan advokasi berbasis riset yang tidak bergantung dengan donor. Seperti menjalankan *fundraising*, membangun kewirausahaan sosial.
 - Membangun dan memperluas kerjasama terhadap konstituen dalam hal ini pemerintah, lembaga negara, kampus, CSO lokal dan nasional, dan masyarakat.
2. **Strategi Agenda Riset dan Advokasi**, sebagai ruh dalam gerakan advokasi anggaran berbasis bukti. Advokasi murni menempatkan lembaga Fitra Riau pada posisi tawar yang rendah dan tidak memiliki pengaruh yang kuat. Sinergi riset dan advokasi diharapkan akan berkontribusi terhadap meningkatnya daya pengaruh lembaga Fitra Riau terhadap pengambil kebijakan. Untuk itu dalam mewujudkan ini diperlukan penguatan kapasitas personel untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan riset. Selain itu juga perlu membangun kerjasama stakeholder sebagai penjamin mutu atas riset dan advokasi yang dilakukan.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN
AGENDA STRATEGIS 2019-2023

A. Agenda Transformasi Kapasitas Kelembagaan

Komponen Utama	Target/Indikator Keberhasilan	Agenda Strategis
Peningkatan Kompetensi SDM dan Kapasitas Kelembagaan menunjang pengembangan Budget Resource Center (BRC) Fitra Riau	1. Adanya SDM Fitra Riau yang memiliki kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Olah Data <input type="checkbox"/> Analisis & Menulis <input type="checkbox"/> Managemen Program <input type="checkbox"/> Komunikasi Publik <input type="checkbox"/> Pemahaman Regulasi <input type="checkbox"/> Metodologi Riset <input type="checkbox"/> Bahasa asing 2. Adanya peningkatan sarana pendukung kerja lembaga sesuai dengan kebutuhan. 3. Adanya SDM khusus yang memiliki spesialis dibidang riset.	Mentoring pengolahan data anggaran
		Mentoring penyusunan press rilis/budget brief/opini/analisis
		Mentoring dan praktek riset anggaran
		Menata ulang regulasi anggaran & buku referensi
		Mentoring penyusunan proposal program
		Penugasan belajar kepada lembaga lain
		Belajar bahasa asing dwi mingguan
		Memperbaiki dan menambah SOP (personalia & keuangan)
		Analisis struktur dan SDM (Kriteria Kompetensi & Job Descriptions)
		Mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan internal
Memperbaiki dan menambah sarana pendukung kinerja lembaga sesuai dengan kebutuhan		
Penyediaan Data Valid dan Aktual	1. Terbangunnya tata kelola data secara regular, actual dan valid. 2. Terbangunnya integrasi data dan informasi 3. Terpublikasikannya data menjadi informasi melalui media internal 4. Terbangunnya kerjasama dalam permudahan akses data dan informasi kepada lembaga eksternal	Menyusun dan menyimpan data anggaran dalam server
		Menyusun SOP pengelolaan data
		Membangun kerjasama akses data anggaran Desa, Kab/Kota dan Provinsi
		Mengaktifkan publikasi data dalam website & media sosial
Peningkatan Kuantitas dan kualitas produk	1. Meningkatnya jumlah produk berupa hasil kajian, presrilis, policy brief, factsheet. 2. Hasil kajian dan advokasi dijadikan rujukan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan desa.	Penugasan bulanan satu orang satu produk
		Mendokumentasikan hasil kerja program menjadi buku/bahan publikasi
		Menyusun & adopsi SOP Riset
		Kerjasama pakar/praktisi/akademisi sebagai reviewer riset
		Pendaftaran produk di Perpustakaan Nasional RI
Perluasan jumlah kader advokasi	1. Meningkatnya jumlah SDM Fitra Riau yang terlibat dalam mempengaruhi kebijakan	Menyusun kurikulum belajar anggaran
		Menyusun panduan analisis anggaran
		Melaksanakan Sekolah Anggaran (BeLA-

anggaran	2. Meningkatnya jaringan/masyarakat yang turut mendukung advokasi anggaran 3. 50% Alumni Bela Anggaran melakukan advokasi anggaran 4. Adanya kelompok perempuan yang melakukan advokasi anggaran	Anggaran)
		Menyusun panduan/SOP magang
		Magang alumni terbaik BeLA-Anggaran
		Memproduksi dan menerbitkan produk- produk pengetahuan kreatif bagi masyarakat
		Melaksanakan kampanye-kampanye kreatif.
Penyiapan sumber pendanaan alternatif	Adanya alternatif pendanaan Fitra Riau yang mampu membiayai advokasi lembaga secara berkelanjutan	Menyusun rencana bisnis
		Membentuk tim fundraising
		Mentoring kewirausahaan sosial (dukungan Seknas FITRA)
		Melaksanakan kegiatan usaha/kerjasama usaha
Memperkuat & memperluas jaringan	1. Bertambahnya jumlah jaringan Pemerintah 2. Jaringan Donor 3. Meningkatkan jumlah komunitas desa/daerah yang peduli anggaran. 4. Jaringan CSO 5. Meningkatnya Kerjasama PT 6. Menambah jaringan BPK /BPKP	Membangun kerjasama dan kegiatan bersama Kampus
		Memperluas asistensi dan akses data pada 7 Kab/Kota
		Mengaktifkan kegiatan bersama community center di Kab/Kota
		Kerjasama dan kolaborasi dengan BPK dan BPKP
		Mengaktifkan komunikasi dan kolaborasi dengan DPRD Prov/Kab/Kota

B. Agenda Strategis Integrasi Riset dan Advokasi

Tema Utama	Targer/Indikator Keberhasilan	Agenda Riset dan Advokasi
Peningkatan kualitas transparansi & Partisipasi Penganggaran Daerah dan Desa	1. 100% Pemda Prov/Kab/Kota mempublikasikan informasi anggaran secara pro-aktif. 2. DPRD Provinsi Riau menerapkan Open Parlemen 3. Semakin banyak masyarakat mengakses informasi anggaran digunakan untuk advokasi kebijakan anggaran.	Agenda Riset
		Studi Evaluasi Penilaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah daerah
		Studi evaluasi Penilaian Kepuasan Pelayanan Informasi Desa di Riau
		Studi Lokal Budget Indek (LBI) Pemerintah Daerah di Provinsi Riau
		Riset Pengelolaan Keuangan Desa di Riau
		Studi Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
		Studi Monitoring Implementasi Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau
		Agenda Advokasi
		Asistensi Kinerja Pelayanan PPID Kabupaten dan Provinsi Se Provinsi Riau
		Kampanye Publik Mendorong Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempublikasikan informasi anggaran dalam website daerah
		Mendorong penggunaan aplikasi JAGA untuk publikasi data anggaran Provinsi, Kab/Kota, dan Desa melalui kampanye dan usulan kebijakan

		Kampanye dan usulan kebijakan open Parlemen di DPRD Provinsi Riau
		Memperkuat kapasitas CBO/komunitas/mahasiswa untuk melakukan uji akses informasi anggaran.
		Mendorong regulasi Komisi Informasi Provinsi Riau
Terwujudnya Akuntabilitas dan Anggaran Pro Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Indeks Tata Kelola Keuangan Daerah 2. 100 % Daerah di Provinsi Riau tepat dalam perencanaan anggaran 3. Usulan Kebijakan diakomodir oleh <i>Policy Maker</i>. 4. Adanya usulan skema bantuan keuangan yang diakomodir oleh <i>Policy Maker</i>. 5. Terimplementasikannya Perda Disabilitas. 	Agenda Riset
		Review tahunan APBD Prov dan Kab/Kota
		Studi Local Budget Analisis (LBA) Prov/Kab/Kota di Riau
		Mengukur Kinerja Penerimaan Keuangan Daerah
		Kajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Hasil Laporan Pemeriksa (LHP) Keuangan Daerah.
		Penilaian terhadap ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran daerah
		Mengukur manfaat belanja pelayanan dasar dan perlindungan sosial
		Mengukur pengetahuan publik terhadap hasil kerja pemerintah daerah
		Studi Analisis Pemanfaatan Keuangan Desa
		Studi Kontirbusi BUMD terhadap pendapatan daerah
		Kajian Implementasi Dana BOS Pendidikan
		Kajian Implementasi Pelayanan Jaminana Kesehatan (JKN)
		Kajian Anggaran Inklusi Sosial
		Studi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
		Studi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten dan Desa
		Studi / Review Prolegda Provinsi Riau
		Agenda Advokasi
		Kampanye, Lobi, Diskusi, Mendorong Implementasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.
		Mengusulkan kebijakan dalam mendorong peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan anggaran sosial dasar
		Mendorong anggaran daerah yang responsip TKHL
		Mengawal proses perencanaan anggaran Kabupaten
		Penyusunan Potensi dan Identifikasi peta potensi PAD Riau
		Asistensi Penyelenggara Pemerintah dalam Perencanaan Anggaran yang Inklusif
		Diseminasi dan kampanye untuk mempengaruhi perbaikan tata kelola anggaran daerah dan desa dan pemberina reward.
		Hearing tematik bersama DPRD Riau
		Mempengaruhi Ranperda Inisiatif DPRD Riau

		Mengawal dan mempengaruhi proses penetapan struktur jabatan (Eselon II)
Korupsi Kebijakan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka praktek korupsi di Riau 2. Meningkatnya indeks persepsi korupsi di Riau 3. Adanya regulasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. 	Agenda Riset
		Studi Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Provinsi Riau
		Kajian perkembangan potensi kerugian daerah
		Kajian potensi kebocoran PAD (PaJak dan Retribusi Daerah)
		Penilaian kualitas keterbukaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah
		Kajian potensi korupsi penggunaan dana bantuan (Parpol, Hibah, Bansos);
		Kajian/ budget tracking penerimaan Negara dari Sektor SDA.
		Agenda Advokasi
		Kampanye dan usulan kebijakan untuk mendorong ULP/Pokja PBJ melakukan "open contract"
		Mendorong melalui usulan kebijakan pencegahan potensi korupsi PAD
		Mendorong regulasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi
		Kampanye, dialog perkembangan korupsi di Riau
		Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat
Kajian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa;		
Membuat produk-produk pengetahuan yang inovatif dan kreatif. (Modul, instrumens, dll)		
Agenda Advokasi		
Mempublikasikan produk-produk pengetahuan kreatif secara regular		
Meningkatkan partisipasi publik terhadap pemahanan pelayanan publik;		
Pengembangan Budget Resource Center (BRC) untuk Pembelajaran Anggaran		
Asistensi dan training anggaran kepada komunitas (BelA-Anggaran).		
Mendorong regulasi daerah terkait tentang partisipasi publik.		
Pengembangan jaringan Komunitas/ Kampus/ Organisasi Mahasiswa/ Lembaga kajian.		

Secara detail *milestones* indikasi pencapaian indikator dan kegiatan sebagaimana **terlampir**.

C. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja terhadap pencapaian keberhasilan tersebut akan dilakukan melalui evaluasi secara regular oleh internal untuk meningkatkan kinerja lembaga melalui forum-forum evaluasi

internal badan pengurus dan forum rapat bersama seluruh komponen organisasi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA. Koordinator bersama staff pembantu badan pengurus mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja kepada badan pengawas melalui rapat badan pengurus dengan badan pengawas baik atas inisiatif badan pengawas maupun atas inisiatif badan pengurus. Keberhasilan indikator capaian akan sangat ditentukan oleh (1). Adanya program yang dilaksanakan oleh badan pengurus yang mendukung pencapaian indikator (2). Keberlanjutan SDM organisasi (3). Dukungan anggaran yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis Forum Indoensia Untuk transparansi Anggaran ini telah melalui proses dan tahapan yang sangat panjang dan mendalam. Namun demikian, kami mengakui bahwa perencanaan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dimungkinkan akan terjadi penyesuaian – penyesuaian dalam tahapan implementasinya. Faktor internal dan eksternal (konstituen) akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan yang telah direncanakan ini, karena dimungkinkan ada perubahan-perubahan diluar prediksi. Keberadaan Renstra ini menjadi dokumen yang sangat penting menjadi acuan kerja kelembagaan untuk lima tahun kedepan (2019-2023). Akhirnya selamat berkarya untuk mencapai kedaulatan rakyat atas anggaran terwujud.

Lampiran; Rencana Agenda Strategis Fitra Riau Tahun 2019-2023

Milestones	Komponen	Indikator Keberhasilan	Agenda Kegiatan	Tentative Dukungan Anggaran
2019 – 2020	<p>Transpormasi Kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM Fitra Riau yang memiliki kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Olah Data <input type="checkbox"/> Analisis & Menulis <input type="checkbox"/> Managemen Program <input type="checkbox"/> Komunikasi Publik <input type="checkbox"/> Pemahaman Regulasi <input type="checkbox"/> Metodologi Riset <input type="checkbox"/> Bahasa asing 2. Terbangunnya tata kelola data secara regular, actual dan valid. 3. Terbangunnya integrasi data dan informasi 4. Meningkatnya jumlah produk berupa hasil kajian, presrilis, policy brief, factsheet. 5. Meningkatnya jumlah SDM Fitra Riau yang terlibat dalam mempengaruhi kebijakan 6. Meningkatnya jaringan/masyarakat yang turut mendukung advokasi anggaran 7. Adanya alternatif pendanaan Fitra Riau yang mampu membiayai advokasi lembaga secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentoring pengolahan data anggaran 2. Mentoring penyusunan press rilis/budget brief/opini/analisis 3. Mentoring dan praktek riset anggaran 4. Menata ulang regulasi anggaran & buku referensi 5. Mentoring penyusunan proposal program 6. Penugasan belajar kepada lembaga lain 7. Belajar bahasa asing dwi mingguan 8. Menyusun dan menyimpan data anggaran dalam server 9. Menyusun SOP pengelolaan data dan informasi 10. Penugasan bulanan satu orang satu produk 11. Mendokumentasikan hasil kerja program menjadi buku/bahan publikasi 12. Menyusun kurikulum belajar anggaran 13. Menyusun panduan analisis anggaran 14. Melaksanakan Sekolah Anggaran (BeLA-Anggaran) 15. Menyusun rencana bisnis 16. Membentuk tim fundraising 17. Mentoring kewirausahaan sosial (dukungan Seknas FITRA) 18. Melaksanakan kegiatan usaha/kerjasama usaha 	Internal Fitra
	<p>Agenda Riset & Advokasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% Pemda Prov/Kab/Kota mempublikasikan informasi anggaran secara pro-aktif. 2. 100 % Daerah di Provinsi Riau tepat dalam perencanaan anggaran 3. Meningkatnya publikasi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat (500 Produk/tahun) 4. Bertambahnya jumlah relawan advokasi anggaran. 5. Adanya 1 kelompok perempuan melakukan advokasi anggaran. 6. Terbangunya kolaborasi komunitas dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran 7. Menurunnya angka praktek korupsi di Riau 	<p>Agenda Riset;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Evaluasi Penilaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah daerah 2. Studi evaluasi Penilaian Kepuasan Pelayanan Informasi Desa di Riau 3. Studi Lokal Budget Indek (LBI) Pemerintah Daerah di Provinsi Riau 4. Studi Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 5. Studi Monitoring Implementasi Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau 6. Review tahunan APBD Prov dan Kab/Kota 7. Studi Local Budget Analisis (LBA) Prov/Kab/Kota di Riau 8. Mengukur Kinerja Penerimaan Keuangan Daerah 9. Kajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Hasil Laporan Pemerinksaan (LHP) Keuangan Daerah. 10. Penilaian terhadap ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran daerah 11. Kajian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa; 12. Mengukur manfaat belanja 	Internal Fitra

			<p>elayanan dasar dan perlindungan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Membuat produk-produk pengetahuan yang inovatif dan kreatif. (Modul, instrumens, dll) 14. Studi Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Provinsi Riau 15. Kajian perkembangan potensi kerugian daerah <p>Agenda Advokasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi Kinerja Pelayanan PPID Kabupaten dan Provinsi Se Provinsi Riau 2. Kampanye Publik Mendorong Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempublikasikan informasi anggaran dalam website daerah 3. Mendorong penggunaan aplikasi JAGA untuk publikasi data anggaran Provinsi, Kab/Kota, dan Desa melalui kampanye dan usulan kebijakan 4. Kampanye, Lobi, Diskusi, Mendorong Implementasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. 5. Mengusulkan kebijakan dalam mendorong peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan anggaran sosial dasar 6. Mendorong anggaran daerah yang responsif TKHL 7. Mempublikasikan produk-produk pengetahuan kreatif secara regular 8. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pemahaman pelayanan publik; 9. Pengembangan Budget Resource Center (BRC) untuk Pembelajaran Anggaran 10. Asistensi dan training anggaran kepada komunitas (BeLA-Anggaran). 11. Kampanye dan usulan kebijakan untuk mendorong ULP/Pokja PBJ melakukan "open contract" 	
2021 – 2022	Transpormasi Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan sarana pendukung kerja lembaga sesuai dengan kebutuhan. 2. Terpublikasikannya data menjadi informasi melalui media internal 3. Hasil kajian dan advokasi dijadikan rujukan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan desa. 4. Bertambahnya jumlah jaringan Pemerintah 5. Jaringan Donor 6. Meningkat jumlah komunitas desa/daerah yang peduli anggaran. 7. 50% Alumni Bela Anggaran melakukan advokasi anggaran 8. Jaringan CSO dan Meningkatnya Kerjasama Perguruan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki dan menambah SOP (personalialia & keuangan) 2. Analisis struktur dan SDM (Kriteria Kompetensi & Job Descriptions) 3. Membangun kerjasama akses data anggaran Desa, Kab/Kota dan Provinsi 4. Menyusun & adopsi SOP Riset 5. Kerjasama pakar/praktisi/akademisi sebagai reviewer riset 6. Pendaftaran produk di Perpustakaan Nasional RI 7. Menyusun panduan/SOP magang 8. Membangun kerjasama dan kegiatan bersama Kampus 9. Memperluas asistensi dan akses data pada 7 Kab/Kota 10. Magang alumni terbaik BeLA-Anggaran 11. Mengaktifkan kegiatan bersama community center di Kab/Kota 	Internal Fitra

	Agenda Riset & Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Indeks Tata Kelola Keuangan Daerah 2. DPRD Provinsi Riau menerapkan Open Parlemen 3. Semakin banyak masyarakat mengakses informasi anggaran digunakan untuk advokasi kebijakan anggaran. 4. Usulan Kebijakan diakomodir oleh <i>Policy Maker</i>. 5. Adanya usulan skema bantuan keuangan yang diakomodir oleh <i>Policy Maker</i>. 6. Adanya dukungan publik dalam advokasi anggaran. 7. Meningkatnya indeks persepsi korupsi di Riau 	<p>Agenda Riset;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah 2. Kajian Implementasi Dana BOS Pendidikan 3. Kajian Implementasi Pelayanan Jaminana Kesehatan (JKN) 4. Kajian Anggaran Inklusi Sosial 5. Studi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 6. Kajian potensi kebocoran PAD (Pajak dan Retribusi Daerah) 7. Penilaian kualitas keterbukaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah 8. Mengukur pengetahuan publik terhadap hasil kerja pemerintah daerah 9. Studi Analisis Pemanfaatan Keuangan Desa 10. Mengawal proses perencanaan anggaran Kabupaten 11. Penyusunan Potensi dan Identifikasi peta potensi PAD Riau <p>Agenda Advokasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hearing tematik bersama DPRD Riau 2. Kampanye dan usulan kebijakan open Parlemen di DPRD Provinsi Riau 3. Memperkuat kapasitas CBO/komunitas/mahasiswa untuk melakukan uji akses informasi anggaran. 4. Mendorong regulasi Komisi Informasi Provinsi Riau 5. Mendorong regulasi daerah terkait tentang partisipasi publik. 6. Asistensi Penyelenggara Pemerintah dalam Perencanaan Anggaran yang Inklusif 7. Diseminasi dan kampanye untuk mempengaruhi perbaikan tata kelola anggaran daerah dan desa dan pemberina reward. 8. Pengembangan jaringan Komunitas/ Kampus/ Organisasi Mahasiswa/ Lembaga kajian. 9. Mendorong melalui usulan kebijakan pencegahan potensi korupsi PAD 	Internal Fitra
2023	Transparansi Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SDM khusus yang memiliki spesialisasi dibidang riset. 2. Terbangunnya kerjasama dalam kemudahan akses data dan informasi kepada lembaga eksternal 3. Adanya kelompok perempuan yang melakukan advokasi anggaran 4. Menambah jaringan BPK /BPKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan internal 2. Memperbaiki dan menambah sarana pendukung kinerja lembaga sesuai dengan kebutuhan 3. Mengaktifkan publikasi data dalam website & media sosial 4. Memproduksi dan menerbitkan produk- produk pengetahuan kreatif bagi masyarakat 5. Melaksanakan kampanye- kampanye kreatif. 6. Kerjasama dan kolaborasi dengan BPK dan BPKP 7. Mengaktifkan komunikasi dan kolaborasi dengan DPRD Prov/Kab/Kota 	Internal Fitra

	Agenda Riset & Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimplementasikannya Perda Disabilitas. 2. Adanya regulasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. 	Agenda Riset; <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten dan Desa 2. Studi / Review Prolegda Provinsi Riau 3. Kajian potensi korupsi penggunaan dana bantuan (Parpol, Hibah, Bansos); 4. Kajian/ budget tracking penerimaan Negara dari Sektor SDA. Agenda Advokasi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempengaruhi Ranperda Inisiatif DPRD Riau 2. Mengawal dan mempengaruhi proses penetapan struktur jabatan (Eselon II) 3. Mendorong regulasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi 4. Kampanye, dialog perkembangan korupsi di Riau 	Internal Fitra
--	------------------------------------	--	---	----------------